



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**RENCANA KERJA
(RENJA) – SKPD
TAHUN 2024**

**Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Banjarbaru**

PENGANTAR

Dengan Memanfaatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan.

Implementasi dari tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mensyaratkan beberapa hal, diantaranya adalah adanya perencanaan yang baik pada satu periode tertentu. Rencana Kerja suatu instansi yang dilaksanakan oleh bagian-bagian kerja dalam Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan setiap tahunnya dituangkan dalam RENJA Tahun 2024 yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun berjalan.

RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan RENJA ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap karyawan/ti Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Banjarbaru, Januari 2024

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,

Dr. RAHMADDIN MY, A.Ks, M.Si

Pembina Tingkat Utama Muda
NIP. 19740310 199003 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA dan Capaian RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalsel.....	5
2.2 Analisa Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov Kalsel	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	33
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov.Kalsel	33
3.2. Program dan Kegiatan	34
BAB IV PENUTUP	39



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov.Kalsel.....	7
Tabel 2.2. Target dan Pencapaian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov Kalsel	12
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalsel Tahun 2024	24
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov.Kalsel	29
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov.Kalsel Tahun 2024	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 sebagai acuan penyusunannya. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari RENSTRA 2021-2026 dan pedoman yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa dibawah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengelola strategi pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemantauan serta evaluasi pengadaan barang/jasa.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.



Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - c. Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pembinaan sumberdaya manusia, pembinaan kelembagaan dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- c. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi Dan/Atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 517) ;
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi pemerintah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 090 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;



25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 089 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kegiatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mengoptimalkan peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Berisi uraian evaluasi Renja tahun lalu dan capaian renstra, analisa kinerja, isu-isu penting tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penetapan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan

BAB IV. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini merupakan penjabaran RENSTRA Tahun Keempat dalam lima tahun yaitu pada RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2021-2026. Sedangkan untuk evaluasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 2 (Dua) Program dengan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

- 2.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 2.2. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik
 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik



- Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

2.3. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

- Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
- Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1 (TC.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100 Point							
4.01.01.1. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok		12 dok	12 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
4.01.01.1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir TahunYang Sesuai Ketentuan	8 dok		1 dok	1 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
4.01.01.1. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	240 stell		116 lembar	116 lembar	100%	120 stell	120 stell	100%
4.01.01.1. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024

4.01.01.1.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	1000 L	12 bulan	1.086 L	965 L	88.86%	752 L	752 L	100%
4.01.01.1.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen kinerja dan penatausahaan perencanaan, keuangan dan kepegawaian yang disusun	12 Dok	3 dok	1 dok	1 dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
4.01.01.1. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	60 unit/paket	100%	10 unit/buah	10 unit/buah	100%	33 unit	33 unit	100%
4.01.01.1. 07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Jasa Komunikasi/ Internet Tiap Bulan	12 Lap/bulan	12 bulan	12 Lap/bulan	12 lap/bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	- Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa - Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa - Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan - Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;	- 75 (baik) 25% 87	Level 3 - - 83	Level 3+ - 25% 85	Level 3+ - 54.38% 99.70	100% - 217.52% 117.29%	- 75 baik 25% 87	- 90.21 59.91% 99.83	- 79 baik 239.64% 114.75%
4.01.07.1. 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Persentase proses PBJ Prov.Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu - Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024

4.01.07.1.0 1.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 laporan	100%
4.01.07.1.0 1.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.07.1.0 1.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.07.1. 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Persentase pemenuhan LPSE sesuai peraturan perundang-undangan - Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	100% 0.8	100% 0.8	100% 0.8	100% 0.8	100% 100%	100% 0.8	100% 0.8	100% 0.8
4.01.07.1.0 2.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	- Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.07.1.0 2.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.07.1.0 2.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.07.1. 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Persentase SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten - Persentase pelayanan administrasi tata usaha biro - Persentase UKPBJ provinsi, Kab/Kota dengan tingkat kematangan minimal level 3 - Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	100% 100% 55.55% 100%	85% - 7% 100%	50% - 17% 100%	86.67% - 21.43% 100%	173.34% - 126.06% 100%	57.14% 100% 18.18% 100%	97.56% 100% 45.45% 100%	97.56% 100% 45.45% 100%



4.01.07.1.0 3.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	30 orang	11 orang	5 orang	5 orang	100%	25 orang	39 orang	100%
4.01.07.1.0 3.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
4.01.07.1.0 3.03	Pendampingan Konsultasi, dan dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%



2.2. Analisa Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Pada dasarnya Kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Terkait dengan TUPOKSI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka keluaran (output) yang didapat antara lain yakni dokumen perencanaan seperti Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Secara umum Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah tercapai dengan hasil-hasil yang telah ditentukan. Adapun penjabaran capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti pada Tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2 (Tc.30)
PENCAPAIAN KINERJA
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Akhir Tahun		Catatan Analisis
				Tahun (n-2) 2022	Tahun (n-1) 2023	Tahun n 2024	Tahun (n+1) 2025	Tahun (n-2) (2022)	Tahun (n-1)(2023)	Tahun n (2024)	Tahun (n+1)(2025)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Kinerja Perangkat Daerah												
1	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	Level 3+	-	-	-	Level 3	Level 3	-	-	
2	Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	75 Baik	85 Baik	88 Baik	79	90.21	85 Baik	88 Baik	
3	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	85	87	87	87	99.70	99.83	87	87	
4	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan Melalui Pengadaan	33%	10%	25%	25%	25%	25%	54.38%	59.91%	25%	25%	
6	Presentase proses PBJ Prov.Kalsel sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Presentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa			2 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2 laporan	12 Laporan	12 Laporan	
9	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	
10	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	
11	Presentase pemenuhan LPSE sesuai peraturan perundang-			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



	undangan											
12	Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan			0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
13	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
14	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa			12 Laporan	12 Laporan	3 fitur/konten (12 Laporan)	3 fitur/konten (12 Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	3 fitur/konten (12 Laporan)	3 fitur/konten (12 Laporan)	
15	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
16	Persentase Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten			50%	57.14%	66.67%	75%	86.67%	97.56%	66.67%	75%	
17	Presentase pelayanan administrasi tata usaha biro			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
18	Presentase UKPBJ prov, Kab/Kota dengan tingkat kematangan minimal level 3			17%	18.18%	30%	44.44%	21.43%	45.45%	30%	44.44%	
19	Presentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa			5	25	40	40	5	39 orang	40	40	
21	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa			12 laporan	12 laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
22	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek PBJ			12 laporan	12 laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
23	Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan			100 point	100 point	100 point	100 point	100 point	100 point	100 point	100 point	
24	Presentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024

	baik											
25	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			12 dok	2 dok	6 dok	8 dok	12 dok	2 dok	6 dok	8 dok	
26	Prensetase administrasi keuangan perangkat daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
27	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran			1 laporan	12 laporan	6 dok	8 dok	1 laporan	12 dok	6 dok	8 dok	
28	Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
29	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			116 stell	120 stell	240 stell	240 Stell	116 stell	120 stell	240 stell	240 Stell	
30	Presentase administrasi umum perangkat daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
31	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD			1 Dok	12 dok	12 dok	12 dok	1 dok	12 dok	12 dok	12 dok	
32	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
33	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			10 unit/buah	33 unit/buah	64 unit/buah	60 unit/buah	10 unit/buah	33 unit	64 unit/buah	60 unit/buah	
34	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
35	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	



2.3 Isu-isu Penting Peyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

Sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tujuan **Meningkatkan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan** Sebagai perumus kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyediaan perlengkapan proses layanan pengadaan barang/jasa serta layanan pengadaan secara elektronik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara maksimal sebagai wujud dukungan terhadap visi Kalimantan Selatan Mandiri dan Terdepan. Didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor permasalahan baik internal maupun eksternal organisasi.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa didalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah :

1. Masih kurang/ belum memadai untuk mendukung tugas-tugas pekerjaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam Jumlah pegawai/ Aparatur Sipil Negara pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, baik sebagai Pejabat Pengadaan barang dan jasa atau yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa serta yang mengelola perencanaan, administrasi keuangan maupun kepegawaian.
2. Keterbatasan dan Pengurangan Anggaran pada beberapa kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sehingga kurang kegiatan bimtek/pelatihan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan pembinaan terhadap kabupaten/kota belum maksimal
3. Adanya regulasi pengadaan barang dan jasa yang selalu berubah-ubah

B. Penentuan Isu-Isu Strategis

a. Kondisi Saat Ini

Secara umum kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa masih belum lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal :

1. Belum tersedianya tenaga Fungsional Tertentu khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Terbatasnya jumlah SDM teknis bidang LPSE;



b. Kondisi Yang Diharapkan

Kondisi yang diinginkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah lancarnya proses pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal :

1. Tersedianya tenaga Fungsional Tertentu khusus Pengadaan barang/Jasa Pemerintah ;
2. Terpenuhinya jumlah SDM Teknis bidang LPSE;

c. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis Lingkungan Strategis terlebih dahulu diawali dengan menentukan prioritas terhadap factor-faktor lingkungan strategis

yang secara spesifik dapat menentukan kondisi yang akan dicapai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026.

Prioritas factor lingkungan strategis internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

d. Analisis Lingkungan Internal.

A. Kekuatan (Strengths).

1. Struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pembiayaan Pelaksanaan Program dan Pengadaan barang dan Jasa bersumber dari Dana APBD.
3. Sarana dan prasarana unit kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan pada tahun 2021 ini sudah tercatat dan diinventarisir dengan baik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan didalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa , sedangkan sarananya antara lain peralatan kantor mendukung program kerja dan kegiatan kerja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Kelemahan (Weaknesses).

Jumlah pegawai/ Aparatur Sipil Negara pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, baik sebagai Pejabat Pengadaan barang dan jasa atau yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa serta yang mengelola



perencanaan, administrasi keuangan maupun kepegawaian masih kurang/ belum memadai dalam mendukung tugas-tugas pekerjaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

c. Analisis Lingkungan Eksternal.

A. Peluang (Opportunities).

- 1) Diklat dan Bimtek bagi pegawai/aparatur, dengan adanya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai/aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informatika/ informasi yang sangat mendukung mobilitas pelaksanaan pekerjaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, seperti perkembangan komputerisasi, internet dan media sosial yang akan membuat pekerjaan lebih mudah diolah dan dikerjakan; dan
- 3) Peraturan pelaksanaan yang dibuat/ diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, dengan adanya peraturan yang akan mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah terutama tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

B. Tantangan/Ancaman (Threats).

- 1) Adanya tuntutan untuk mengikuti Diklat Teknis Aparatur.
- 2) Adanya tuntutan untuk meningkatkan kemampuan diri untuk menambah wawasan dan meningkatkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi.
- 3) Membina Hubungan kerja dengan SKPD terkait dengan meningkatkan koordinasi baik di tingkat Provinsi maupun ditingkat Pusat.

iv. Asumsi Strategis.

Asumsi strategis penentuan prioritas perencanaan terhadap factor-faktor lingkungan strategis yang secara spesifik dapat menentukan kondisi yang akan dicapai oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan Analisis *Strenghts*, *Weaknesses*, *Opportunities and Threats* (SWOT Analysis), sehingga diperoleh asumsi strategis sebagai berikut :

A. Asumsi Strategis Strenghts-Opportunities (SO).

1. Optimalkan kualitas Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil agar lebih professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pencapaian kinerja dapat lebih maksimal, lebih efektif dan lebih efisien.



2. Optimalkan ketersediaan pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa/ jabatan fungsional tertentu dalam mendukung tugas – tugas pengelolaan barang dan jasa.
- B. Asumsi Strategis *Strenghts-Threats* (ST).
1. Manfaatkan kebijakan dan upaya pimpinan dalam mengkoordinasikan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pegawai Negeri Sipil agar lebih professional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 2. Manfaatkan kebijakan dan upaya pimpinan dalam mengkoordinasikan kepada SKPD terkait dalam peningkatan ketersediaan pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa dengan mengangkat jabatan fungsional tertentu dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan barang dan jasa.
- C. Asumsi Strategis *Weaknesses-Opportunities* (WO).
1. Tingkatkan pemahaman atas upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pegawai Negeri Sipil agar lebih profesional.
 2. Tingkatkan profesionalitas aparatur untuk dipromosikan dalam jabatan fungsional tertentu dengan mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
- D. Asumsi Strategis *Weaknesses -Threats* (WT).
1. Tingkatkan pemahaman atas upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pegawai Negeri Sipil untuk mengantisipasi adanya aparatur yang masih kurang terampil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
 2. Tingkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dengan melalui pembinaan aparatur untuk dipromosikan dalam jabatan fungsional tertentu pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mengurangi kesenjangan kurangnya tenaga pejabat pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan.

v. Prioritas Asumsi Strategis.

Prioritas asumsi strategis ditetapkan dengan menentukan hasil asumsi strategis yang paling dominan dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan-kebijakan baru internal maupun eksternal yang signifikan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan analisis asumsi strategis yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan, maka prioritas dari asumsi strategis yang dipilih untuk mencapai tujuan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :



- a. Optimalkan kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mendukung implementasi kebijakan dan komitmen Gubernur terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan profesional berbasis kinerja.
- b. Optimalkan tenaga analis jabatan, dan hasil analisa beban kerja secara sinergis untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi sebagai upaya mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean goverment*.
- c. Manfaatkan kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- d. Manfaatkan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. Tingkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja guna mengantisipasi adanya tuntutan peningkatan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pendayagunaan aparatur dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

D. Faktor Kunci Keberhasilan.

Prioritas asumsi strategis ditetapkan dengan menentukan hasil asumsi strategis yang paling dominan dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan-kebijakan baru internal maupun eksternal yang signifikan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan analisis asumsi strategis yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan, maka prioritas dari asumsi strategis yang dipilih Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk mencapai tujuan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Dukungan yang kuat dari pimpinan dan semua pegawai/SDM (ASN/Non ASN) dalam merespon kepentingan daerah
2. Sarana dan prasarana berupa ruang kerja, peralatan dan perlengkapan kantor yang mendukung tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3. Adanya kebutuhan dan kepercayaan stakeholder terhadap pera Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam usaha mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang professional, akuntabel dan berkualitas



➤ IDENTIFIKASI MASALAH/AKAR MASALAH PADA BIRO PENGADAAN BARANG & JASA

URUSAN	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Pemerintah Bidang Penunjang Pemerintah		
Sekretariat Daerah		
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1. Adanya regulasi pengadaan barang dan jasa yang selalu berubah-ubah	Peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diterbitkan oleh instansi pusat yang berpengaruh pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di daerah
	2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informatika/informasi	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat menuntut SDM untuk dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya
	3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Sarana kantor LPSE dan ruang layanan tamu yang belum representative dalam mendukung pelayanan public/pengguna layanan pengadaan barang dan jasa yang berkonsultasi
		Meubelair berupa meja dan kursi untuk pelayanan kepada tamu masih kurang
		Peralatan computer PC, Laptop dan printer sebagai penunjang dalam pelaksanaan pekerjaan masih kurang
	4. Terbatasnya sumber daya manusia	Keterbatasan jumlah SDM yang akan mempengaruhi keterbatasan pelayanan
		Jumlah fungsional PBJ yang memenuhi ABK yang telah ditetapkan dan adanya fungsional PBJ yang pensiun



		Jumlah fungsional umum/pelaksana yang juga masih kurang karena ada sub bagian yang tidak memiliki ASN dan adanya ASN/Pelaksana yang pensiun
	5. Pembinaan terhadap UKPBJ Kab/Kota se-Kalsel	Pembinaan UKPBJ di Kab/Kota se-Kalsel belum maksimal yang mengakibatkan tingkat kematangan UKPBJ pada 9 Kab/Kota belum mencapai Level 3/Pro aktif
		Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pembinaan dan monitoring ke Kab/Kota se-Kalsel



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana halnya dengan RENJA Tahun 2024 ini, RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Dengan kata lain RKPD Tahun 2024 adalah RKPD Tahap V berjalan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

Visi yang hendak dicapai dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 dengan Visi : ***“Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera”***.

Secara umum, hasil analisis kebutuhan pelaksanaan TUPOKSI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dan RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. RENSTRA adalah sebagai pedoman bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan pengelolaan administrasi aset pemerintah daerah, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Tujuan Utama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tercemin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan
3. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan Tujuan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti tersebut diatas, maka disusunlah program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sesuai dengan TUPOKSI yang ada. Adapun hasil telaahan dengan Rancangan Awal RKPD dan analisis kebutuhan pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dijabarkan pada Tabel 2.3 berikut



Tabel 2.4 (Tc 31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Provinsi Kalimantan Selatan			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu 2. Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	100% 100%	Rp.1.345.159.600	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu 2.Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	100% 100%	Rp.1.345.159.600



	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		1. Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	12 dok	Rp.531.734.800	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		1. Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	12 dok	Rp.531.734.800
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 dok	Rp.474.041.800	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 dok	Rp.474.041.800
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		1. Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.339.383.000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		1. Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.339.383.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1. Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan. 2. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan.	100% (4:5 = 0,8)	Rp.2.318.330.600	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1. Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan. 2. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan.	100% (4:5=0,8)	Rp.2.318.330.600
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik		1. Jumlah sistem aplikasi yang dikelola dalam mendukung pengadaan secara elektronik	12 Lap	Rp.800.741.000	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik		1. Jumlah sistem aplikasi yang dikelola dalam mendukung pengadaan secara elektronik	12 Lap	Rp.800.741.000



	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah pengembangan fitur/konten sistem informasi pengelola pengadaan barang dan jasa	12 Lap	Rp.675.652.000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah pengembangan fitur/konten sistem informasi pengelola pengadaan barang dan jasa	12 Lap	Rp.675.652.000
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 Lap	Rp.841.937.600	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 Lap	Rp.841.937.600
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1. Persentase ketersediaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas dan bersertifikat PBJ. 2. Persentase pelayanan administrasi tata usaha Biro 3. .Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) provinsi, kabupaten/kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3 4. Presentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	66.67% 100% 30% 100%	Rp.2.476.972.600	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Persentase ketersediaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas dan bersertifikat PBJ. 2. Persentase pelayanan administrasi tata usaha Biro 3. .Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) provinsi, kabupaten/kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3 4. Presentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	66.67% 100% 30% 100%	Rp.2.476.972.600



	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		1. Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	40 orang	Rp.817.056.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		1. Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	40 orang	Rp.817.056.000
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 lap	Rp.605.988.600	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 lap	Rp.605.988.600
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		1. jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek pengadaan barang dan jasa	12 lap	Rp.1.053.928.000	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		1. jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek pengadaan barang dan jasa	12 lap	Rp.1.053.928.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	Rp.10.179.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	Rp.10.179.000



	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	6 Dokumen	Rp.10.179.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	6 Dokumen	Rp.10.179.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp.36.658.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp.36.658.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir TahunYang Sesuai Ketentuan	6 Dokumen	Rp.36.658.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir TahunYang Sesuai Ketentuan	6 Dokumen	Rp.36.658.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	Rp.95.892.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	Rp.95.892.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	240 Lembar	Rp.95.892.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	240 Lembar	Rp.95.892.000



	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan	100%	Rp.619.975.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan	100%	Rp.619.975.900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	-	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	-	-
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen kinerja dan penatausahaan perencanaan, keuangan dan kepegawaian yang disusun	12 Dokumen	Rp.619.975.900	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen kinerja dan penatausahaan perencanaan, keuangan dan kepegawaian yang disusun	12 Dokumen	Rp.619.975.900
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Rp.476.232.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Rp.476.232.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan,	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	64 unit/buah	Rp.476.232.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	64 unit/buah	Rp.476.232.000



	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Besar	Terlaksananya Kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	100%	Rp.802.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Selatan, Sungai Besar	Terlaksananya Kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	100%	Rp.802.800.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya Rekening Jasa Komunikasi/ Internet Tiap Bulan	12 laporan	Rp.802.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya Rekening Jasa Komunikasi/ Internet Tiap Bulan	12 bulan	Rp.802.800.000



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Tabel 2.5 (Tc 32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besarnya/ Volume	Catatan
1	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		1. PREDIKAT INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA 2. JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK 3. NILAI INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	75 (baik) 3 Indeks 87,00 (kategori sangat memuaskan)	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1. Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu 2. Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up 3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100% 100% 25%	-
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	-
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	-
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1. Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan dan tepat waktu 2. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	100% Rasio 0,8	-
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah sistem aplikasi yang dikelola dalam mendukung pengadaan secara elektronik	3 Aplikasi (12 laporan)	-
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah pengembangan fitur/konten sistem informasi pengadaan barang dan jasa	3 fitur/konten	



	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1. Persentase ketersediaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas dan bersertifikat PBJ 2. Persentase pelayanan administrasi Tata usaha Biro 3. Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) provinsi, kabupaten/kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3 4. Presentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	66.67% 100% 30% 100%	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	100%	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	35%	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	6 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir TahunYang Sesuai Ketentuan	6 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	240 Stell	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	Tersedianya BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	-	



	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	Jumlah dokumen kinerja dan penatausahaan perencanaan, keuangan dan kepegawaian yang disusun	12 Dok	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	64 unit/buah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	Terbayarnya Rekening Jasa Komunikasi/ Internet Tiap Bulan	12 bulan	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah mengoptimalkan peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan Utama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah **Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang** tercemin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
3. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Tahun 2024 adalah **“Terwujudnya peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan”**. Yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan pengadaan barang dan jasa
2. Meningkatnya Kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
3. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2024 ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan akan melaksanakan 2 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 Kegiatan dengan perkiraan Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.182.200.619,-. Adapun rumusan rencana Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Sebagai Tabel Berikut **(Tc 33)** :



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		Prakiraan Renacana 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif(Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif(Rp.)
1	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		1. PREDIKAT INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA 2. NILAI INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3. RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN	75 (baik) Indeks 87, 00 (kategori sangat memuaskan) 25%	Rp.6.140.462.800	75 (baik) Indeks 87, 00 (kategori sangat memuaskan) 25%	Rp.7.195.696.100
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1. Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang- undangan dan tepat waktu 2. Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	100% 100%	Rp.1.345.159.600	100% 100%	Rp. 1.447.346.000
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.531.734.800	2 Laporan	Rp.548.151.000
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.474.041.800	12 Laporan	Rp.499.136.000



	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmasin,Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.339.383.000	12 Laporan	Rp.400.059.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1. Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan dan tepat waktu 2. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	100% Rasio 0,8	 Rp.2.318.330.600	100% Rasio 0,8	Rp.2.620.999.100
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmasin,Sungai Besar	1. Jumlah sistem aplikasi yang dikelola dalam mendukung pengadaan secara elektronik)	12 laporan	Rp.800.741.000	12 Laporan	Rp.1.071.022.000
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmasin,Sungai Besar	1. Jumlah pengembangan fitur/konten sistem informasi pengadaan barang dan jasa	3 fitur/koten	Rp.675.652.000	12 Laporan	Rp.699.994.500
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmasin,Sungai Besar	1. Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.841.937.600	12 Laporan	Rp.849.982.600
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1. Persentase ketersediaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas dan bersertifikat PBJ 2. Persentase pelayanan administrasi Tata usaha Biro 3. Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	66.67% 100% 30%	 Rp.2.476.972.600	75% 100% 44.44%	Rp.3.127.351.000



			(UKPBJ) provinsi, kabupaten/kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3 4. Presentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	100%		100%	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	40 orang	Rp.817.056.000	45 orang	Rp.1.286.278.500
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.605.988.600	12 Laporan	Rp.632.350.000
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.1.053.928.000	12 Laporan	Rp.1.208.722.500
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp.2.041.736.900		Rp.2.021.515.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	Rp.10.179.000	100%	Rp.14.512.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmaru Selatan,Sungai Besar	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	6 Dokumen	Rp.10.179.000	6 Dokumen	Rp.14.512.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp.36.658.000	100%	Rp.36.020.000



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024

	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmasin,Sungai Besar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir TahunYang Sesuai Ketentuan	6 Dokumen	Rp.36.658.000	4 Dokumen	Rp.36.020.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	Rp.95.892.000	100%	Rp.113.500.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmasin,Sungai Besar	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	240 Stell	Rp.95.892.000	246 Stell	Rp.113.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan	100%	Rp.619.975.900	100%	Rp.1.039.283.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmasin,Sungai Besar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	-	2 Laporan	Rp.340.916.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmasin,Sungai Besar	Jumlah dokumen kinerja dan penatausahaan perencanaan, keuangan dan kepegawaian yang disusun	12 Dok	Rp.619.975.900	12 Dok	Rp.698.367.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Rp.447.000.000	100%	Rp.412.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmasin,Sungai Besar	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	64 unit/buah	Rp.476.232.000	13 unit/buah	Rp.412.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Biro Pengadaan Barang	100%	Rp.802.800.000	100%	Rp.406.200.000



			dan Jasa)				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarb aru Selatan,Sungai Besar	Terbayarnya Rekening Jasa Komunikasi/ Internet Tiap Bulan	12 bulan	Rp.802.800.000	12 bulan	Rp.406.200.000
	Total				Rp.8.182.200.500,-		Rp.9.217.211.100,-



BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, adalah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan merupakan manifestasi dari respon Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Dari Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders terutama seluruh pegawai/SDM yang ada pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan dan Sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pasti akan dapat dicapai, manakala didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada serta diiringi oleh sikap tawaqal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan. Aamiin.